

Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya

PENYUSUNAN DATA

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN
JAYAWIJAYA

2024



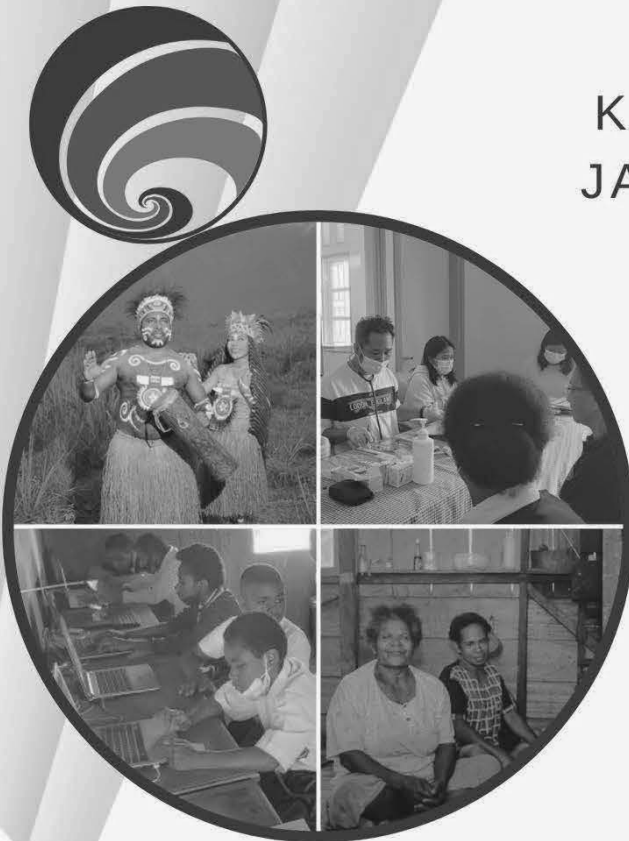
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya

PENYUSUNAN DATA

ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN
JAYAWIJAYA

2024



ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

Ukuran Buku : 16,22 × 22,9

Jumlah Halaman : ix + 88 Halaman

Naskah <
KOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA

Gambar Kulit <
KOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA
unsplash.com

Diterbitkan oleh <
Í 'KOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA

Dicetak oleh :
KOMINFO KABUPATEN JAYAWIJAYA

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/
atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari Diskominfo Kabupaten Jayawijaya.**



Thony M. Mayor, S. Pd., MM
Pj. Bupati Jayawijaya



Arklaus Windesi, S. Sos., M. Si
Kepala Dinas Kominfo Jayawijaya



KATA PENGANTAR

Makna dari pembangunan manusia sebenarnya mencakup bidang yang sangat luas. Namun apabila disederhanakan dapat dikelompokkan menjadi tiga dimensi yaitu: lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Dengan memahami konsep pembangunan secara utuh, diharapkan reorientasi pendekatan pembangunan dalam praktik pembangunan daerah akan semakin mudah diimplementasikan dan dilaksanakan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penyediaan data dan informasi tentang kinerja pembangunan manusia sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, saya sambut gembira atas diterbitkannya publikasi **“Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024”**.

Kepada semua pihak yang telah berupaya sungguh-sungguh sehingga dapat menerbitkan publikasi ini, saya ucapkan terima kasih. Saya berharap agar konfirmasi dan koordinasi terus dilakukan guna meningkatkan kualitas dan keragaman data yang disajikan.

Semoga publikasi ini bermanfaat dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, November 2024

**Kepala Dinas Kominfo
Kabupaten Jayawijaya**

ARKLAUS WINDESI, S.Sos, M.Si

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATALOG	ii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Sasaran	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.3.1 Ruang Lingkup Materi	5
1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah	6
1.4 Istilah-Istilah yang Digunakan (Terminologi).....	6
 BAB II DATA DAN METODOLOGI	 9
2.1 Indeks Pembangunan Manusia	9
2.2 Manfaat IPM	10
2.3 Perkembangan Metodologi IPM	11
2.4 Perubahan Metodologi IPM Tahun 2014	13
2.5 Komponen IPM.....	15
2.6 Teknis Penghitungan IPM Metode Baru	19
2.7 Konsep dan Definisi Disparitas Pembangunan Manusia dan Reduksi Shortfall.....	29

Daftar Isi

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH.....	31
3.1 Kondisi Geografi dan Iklim	31
3.2 Kependudukan.....	32
BAB IV ANALISIS	37
4.1 Perkembangan IPM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019- 2023.....	37
4.2 Pencapaian Pembangunan Kapabilitas Dasar Manusia.....	41
4.2.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat	42
4.2.2 Dimensi Pengetahuan.....	43
4.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak	46
4.3 Indikator Kesehatan, Pendidikan dan Perekonomian Kabupaten Jayawijaya.....	47
4.3.1 Indikator Kesehatan	47
4.3.2 Indikator Pendidikan	60
4.3.3 Indikator Perekonomian	70
BAB V PENUTUP.....	81
8.1 Kesimpulan	81
8.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Konversi Lama Sekolah.....	22
Tabel 2.2	Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir....	23
Tabel 4.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya Menurut Komponen, 2019-2023.....	41
Tabel 4.2	Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya, 2022 dan 2023	49
Tabel 4.3	Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI dan Lamanya Pemberian ASI di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2023	51
Tabel 4.4	Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, 2023	69
Tabel 4.5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2023	75
Tabel 4.6	Rata-rata Pengeluaran dan Konsumsi per Kapita per Bulan di Kabupaten Jayawijaya, 2023	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Klasifikasi Capaian IPM	19
Gambar 3.1	Piramida Penduduk Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020.....	34
Gambar 4.1	Indeks Pembanguna Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023	39
Gambar 4.2	Perkembangan Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023.....	40
Gambar 4.3	Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir di Kabupaten Jayawijaya (tahun), 2019-2023	43
Gambar 4.4	Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023	44
Gambar 4.5	Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023	46
Gambar 4.6	Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023	47
Gambar 4.7	Angka Kesakitan Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2023.....	50
Gambar 4.8	Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2023.....	53
Gambar 4.9	Persentase Perempuan 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Kelahiran Terakhir Kabupaten Jayawijaya, 2022 dan 2023	54

Daftar Isi

Gambar 4.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Minum di Kabupaten Jayawijaya, 2023	56
Gambar 4.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat BAB di Kabupaten Jayawijaya, 2023.....	58
Gambar 4.12 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Jayawijaya, 2023	59
Gambar 4.13 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2023	62
Gambar 4.14 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun Menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, 2023	64
Gambar 4.15 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2023	66
Gambar 4.16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2023	67
Gambar 4.17 Perkembangan PDRB per Kapita di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023	72

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebelum periode tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja. Teori pembangunan (klasik) pada saat itu adalah bagaimana mencapai suatu kemajuan ekonomi yang tinggi, baik itu melalui kombinasi tabungan, penanaman modal, bantuan asing, dan lain sebagainya agar berhasil menciptakan dan sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan kata lain, konsep klasik tersebut menempatkan pembangunan ekonomi sebagai inti dari pembangunan suatu bangsa, dan memandang manusia sebagai hanya sebagai alat untuk mencapainya. Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya.

Seiring dengan perkembangannya, UNDP mulai mengenalkan konsep pembangunan manusia, yang menyatakan bahwa manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (UNDP, 1990).

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan dan bukan sebagai alat pembangunan. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dilihat dari seberapa besar permasalahan mendasar di masyarakat dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan mendasar itu di antaranya adalah kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, dan buta huruf.

Pada tahun 1991, Bank Dunia menerbitkan laporannya yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan”. (*World Development Report*). Menurut Bank Dunia, pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional. Konsep pembangunan manusia tersebut muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Berbagai ukuran pembangunan manusia telah dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat membandingkan antarwilayah atau antarnegara. Untuk itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index*

(HDI). Menurut UNDP, IPM didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*a process of enlarging the choices of people*). Adapun komponen-komponen dalam penyusunan IPM meliputi : Lamanya Hidup (*longevity*), Pengetahuan/tingkat pendidikan (*knowledge*) dan Standar Hidup (*decent living*).

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Metode penghitungan yang dikembangkan oleh UNDP terus mengalami perkembangan. Metode penghitungan IPM pertama kali di luncurkan pada tahun 1990. Metode tersebut mengalami penyempurnaan pada tahun 1991 dan 1995. Pada tahun 2010, UNDP mengubah penghitungan IPM dan melakukan penyempurnaan pada tahun 2011 dan 2014. Pada publikasi IPM tahun 2016 ini sudah mengadopsi metode tahun 2014 yang merupakan penyempurnaan terbaru dari metode penghitungan IPM yang dibuat pada tahun 2010.

Untuk memperoleh gambaran tentang pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya yang lebih akurat dan mutakhir, maka disusunlah publikasi “Analisis Situasi Pembangunan Manusia (ASPM) Kabupaten Jayawijaya tahun 2024” yang sudah menggunakan metode baru ini. Dari publikasi ini diharapkan selain sebagai catatan indikator kuantitatif dari pembangunan yang selama ini telah dilakukan, juga berfungsi sebagai *starting point* untuk penentuan arah dari pembangunan yang akan dicapai ke depan. Dengan demikian pembangunan akan tepat sasaran sebagaimana yang diamanatkan oleh UU no 5 tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Jayawijaya.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penulisan publikasi ini adalah menyajikan data dan informasi tentang kondisi penduduk dan permasalahannya, sebagai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya. Selanjutnya diharapkan dapat menjadi masukan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di Kabupaten Jayawijaya, termasuk penentuan sektor-sektor prioritas dalam pembangunan manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini meliputi :

- a. Teridentifikasinya kondisi beberapa variabel sektoral dalam pembangunan manusia, meliputi sektor-sektor: kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Kabupaten Jayawijaya.
- b. Diperolehnya gambaran permasalahan di bidang pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya.
- c. Diperolehnya gambaran tentang perkembangan indeks pembangunan manusia (IPM) dan indikator - indikator sosial lainnya di Kabupaten Jayawijaya.
- d. Diperolehnya rumusan implikasi masalah dan kebijakan untuk menangani berbagai permasalahan yang merupakan bagian dari perencanaan dan penanganan pembangunan manusia.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi penulisan ini meliputi :

- Identifikasi kondisi variabel kunci dalam pengukuran besaran IPM yang meliputi : lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup (*decent living*).

- Identifikasi permasalahan mendasar pada sektor-sektor kunci yang terkait dengan IPM, meliputi indikator kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- Pengukuran besaran angka IPM Kabupaten Jayawijaya.
- Analisis Situasi Pembangunan Manusia di Kabupaten Jayawijaya.
- Rumusan kebijakan dalam rangka pembangunan manusia berdasarkan besaran angka IPM yang diperoleh dan analisis situasi pembangunan manusia di Kabupaten Jayawijaya.

1.3.2 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup yang dibahas dalam publikasi ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya.

1.4 Istilah-istilah Yang Digunakan (Terminologi)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks komposit yang disusun dari tiga indikator, yaitu: lama hidup, pendidikan dan standar hidup.

- *Indeks Harapan Hidup*, salah satu dari komponen IPM. Nilai ini berkisar antara 0 – 100.

- *Indeks Daya Beli/Standar Hidup*, didasarkan pada paritas daya beli atau *Purchasing Power Parity (PPP)* yang disesuaikan dengan rumus Atkinson.
- *Angka Harapan Hidup (e_0)*, perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada pola mortalitas menurut umur.
- *Angka Melek Huruf*, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.
- *Harapan Lama Sekolah (HLS)*, lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- *Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*, menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan.

“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”

BAB II

KONSEP DAN METODOLOGI

BAB II

KONSEP DAN METODOLOGI

2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan tahunan Pembangunan Manusia. Istilah Indeks atau Indikator Komposit, adalah suatu istilah yang digunakan untuk indikator yang lebih rumit. Indeks atau indikator komposit memiliki ukuran-ukuran multidimensional yang merupakan gabungan dari sejumlah indikator.

Indeks ini biasanya dikembangkan melalui penelitian khusus karena penggunaannya secara praktis sangat terbatas. Indeks Pembangunan Manusia idealnya mencakup sebanyak mungkin variabel sehingga benar-benar dapat mencerminkan berbagai segi kehidupan manusia yang sangat banyak dan

kompleks, namun ketersediaan data statistik membatasi hal tersebut.

Pada tahap awal penyusunan IPM, pilihan diberikan pada tiga unsur penting/pilar utama/dimensi kehidupan manusia: usia harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. Indikator-indikator sebagai unsur pembentuk indeks tersebut harus dipilih dengan cermat agar dapat menangkap dengan baik berbagai dimensi dari pilihan-pilihan manusia.

2.2. Manfaat IPM

Penghitungan IPM sebagai indikator pembangunan manusia memiliki manfaat penting, diantaranya:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- b. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.
- c. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun tujuan penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

- a. Membangun indikator yang mengukur dimensi dasar pembangunan manusia dan perluasan kebebasan memilih.
- b. Memanfaatkan sejumlah indikator untuk menjaga ukuran tersebut sederhana.
- c. Membentuk satu indeks komposit daripada menggunakan sejumlah indeks dasar.
- d. Menciptakan suatu ukuran yang mencakup aspek sosial dan ekonomi.

2.3 Perkembangan Metodologi IPM

IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 dan komponen IPM yang digunakan AHH, AMH, PDB per kapita. Pada tahun 1991 terjadi penyempurnaan komponen IPM yang digunakan, yaitu AHH, AMH, RLS, dan PDB per kapita. Pada tahun 1995 terjadi penyempurnaan kembali terhadap komponen yang digunakan, yaitu AHH, AMH, Kombinasi APK, PDB per kapita. Pada tahun 2010 UNDP merubah metodologi, yaitu komponen IPM yang digunakan AHH, HLS, RLS, dan PNB per kapita dan agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik. Pada tahun 2011 terjadi perubahan kembali, yaitu mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2008 menjadi 2005. Dan

pada tahun 2014 terjadi penyempurnaan, yaitu mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi 2011 dan merubah metode agregasi indeks pendidikan dan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Data yang digunakan untuk keperluan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jayawijaya ini sebagian besar menggunakan data primer, yakni data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) semesteran tahun 2024. Badan Pusat Statistik untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif luas, antara lain bidang pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dan sosial ekonomi lainnya yang disebut dengan data KOR (keterangan pokok) dan data MODUL (keterangan khusus). Pelaksanaan susenas ini dilakukan secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dengan jumlah sampel berbeda-beda yang tersebar diseluruh propinsi dan kabupaten. Sampel pendataan SUSENAS di Kabupaten Jayawijaya tersebar di delapan kecamatan yang dibagi habis untuk beberapa desa terpilih, dan setiap desa dibagi menjadi blok sensus.

2.4 Perubahan Metodologi IPM Tahun 2014

Pada tahun 2014 terjadi perubahan indikator dan metode penghitungan IPM, yaitu:

1. Angka Melek Huruf (AMH) pada metode lama diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
2. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung Paritas Daya Beli. Pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan Paritas Daya Beli.
3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Alasan yang menjadi dasar perubahan metodologi penghitungan IPM, yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita tidak dapat

menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

2. Kontribusi 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012.
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Keunggulan IPM metode baru, yaitu:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan Rata-rata Lama Sekolah dan angka Harapan Lama Sekolah, bias didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa capaian suatu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan

manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

2.5 Komponen IPM

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir, pengukuran dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan pengukuran dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Penjelasan singkat mengenai komponen yang diperlukan dalam prosedur penghitungan IPM diatas adalah sebagai berikut:

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Angka harapan hidup dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung (*indirect estimation*). Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penghitungan angka harapan hidup yakni anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH). Paket program

Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara pada umumnya (Preston, 2004).

Dalam komponen angka harapan hidup ini, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 (delapan puluh lima) tahun dan terendah 20 (dua puluh lima) tahun. Angka tersebut diambil sesuai standar UNDP dan BPS.

2. Pengetahuan

Indikator yang digunakan dalam mengukur dimensi pendidikan penduduk adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang, dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk

lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan RLS adalah dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Dalam penghitungan indeks pendidikan, batasan nilai maksimum dan minimum juga digunakan sesuai standar UNDP dan BPS. Batas maksimum untuk HLS adalah 18 tahun sedangkan batas minimumnya adalah 0 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah menggunakan batas maksimum 15 tahun dan minimum 0 tahun. Batas maksimum tersebut mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

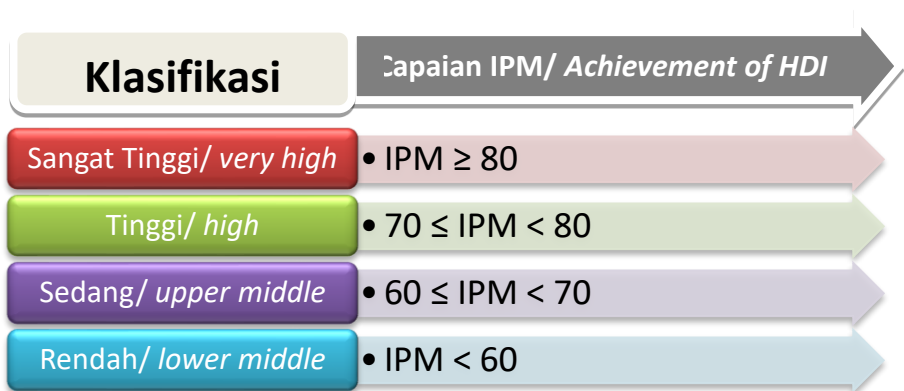
3. Hidup Layak

Dimensi ketiga ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan yang lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. Untuk menghitung paritas daya beli, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan. Nilai maksimum yang dipakai BPS sebesar Rp. 26.572.353 dan nilai minimum sebesar Rp. 1.007.436.

Perkembangan status IPM daerah kabupaten/kota dapat dilihat melalui pengelompokan tingkatan status Pembangunan Manusia yang dapat dikelompokkan atas 4 kriteria. Perubahan kriteria ini dilakukan dengan memecah status IPM tingkatan menengah/sedang menjadi 2 (dua), yaitu menengah bawah dan menengah atas. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria rendahberarti menunjukkan kinerja pembangunan manusia daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketertinggalannya. Jika status pembangunan manusia masih berada pada kriteria menengah, maka hal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan. Jika daerah tersebut telah memiliki status pembangunan manusia tinggi, berarti kinerja pembangunan manusia daerah tersebut sudah baik/optimal. Status IPM yang

sudah tinggi tersebut hanya perlu untuk dipertahankan, agar kualitas manusia tersebut lebih produktif dan pada gilirannya memiliki produktivitas yang tinggi. Berikut ini disajikan uraian tingkatan status pembangunan manusia beserta kriterianya melalui tabel dibawah ini:

Gambar 2.1.Klasifikasi Capaian IPM



2.6 Teknis Penghitungan IPM Metode Baru

1. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Data yang dibutuhkan untuk memperoleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup dengan Mortpak adalah estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun penghitungan dan estimasi rata-rata jumlah anak masih hidup pada tahun penghitungan. Penentuan AHH untuk IPM secara umum berlaku rataaan q_2 , q_3 , dan q_5 ; adakalanya memakai media/modul yang lebih cocok; perlu pertimbangan keahlian

(*adjustment*), pengalaman, tren atau perbandingan (antar waktu, antar wilayah, antar urban/rural, dsb); AHH perempuan diperoleh dari $(106/103) \times \text{AHH total}$; sudah melalui rekonsiliasi dan telah diseminarkan pada seminar parameter demografi.

Penentuan asumsi berdasarkan tren tingkat mortalitas di masa lalu mengikuti hasil SDKI91, SDKI94, SDKI97, SDKI2002/3, SDKI2007, dan SDKI2012, dengan rumus:

$$y = L + \frac{U}{1 + be^{at}}$$

- y = Perkiraan AKB
- L = Konstanta *asymtot* bawah AKB
- U = Konstanta *asymtot* atas AKB
- a,b = Koefisien kurva logistik
- t = Waktu sebagai variabel bebas
- e = Konstanta eksponensial

Rumus penghitungan Indeks Kesehatan:

$$I_{\text{kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Langkah pertama yaitu menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun keatas); langkah kedua menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas); langkah ketiga menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas), langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur; langkah keempat menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas). Formula yang digunakan yaitu:

$$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i : Usia (a, a+1, ..., n)

3. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Langkah pertama yaitu menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas; langkah kedua yaitu menghitung lamanya sekolah, jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah sekolah, maka lama sekolah=0, jika partisipasi sekolah yaitu masih sekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut:

Tabel 2.1. Konversi Lama Sekolah

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Tabel 2.2. Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

Langkah ketiga yaitu menghitung rata-rata lama sekolah dengan rumus:

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

RLS: Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk_i: lama sekolah penduduk ke-*i* di suatu wilayah

n: jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Rumus Indeks Pengetahuan:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

yang terdiri dari:

$$\bullet \quad I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{\min}}{HLS_{\max} - HLS_{\min}}$$

$$\bullet \quad I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{\min}}{RLS_{\max} - RLS_{\min}}$$

4. Pengeluaran per kapita

Langkah pertama yaitu menghitung rata-rata pengeluaran per kapita; langkah kedua yaitu menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil); langkah ketiga yaitu menghitung Paritas Daya Beli; langkah keempat yaitu menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan.

Penghitungan rata-rata pengeluaran perkapita dilakukan dalam 3 tahap, yaitu menghitung pengeluaran per kapita (anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap kabupaten/kota; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan Y'_t = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan $\times 12/1000$.

Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran perkapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Keterangan:

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y'_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

Menghitung paritas daya beli dilakukan dengan 3 tahap, yaitu tahap pertama menghitung harga rata-rata komoditas terpilih dengan rumus:

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

- P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah
- V_i = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah
- Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Untuk harga yang tidak terdapat pada modul konsumsi Susenas, harga diperoleh dari IHK, yaitu:

- Perlengkapan mandi → pasta gigi, sabun mandi, shampoo, sikat gigi
- Barang habis pakai rumah tangga → bola lampu, lampu TL/neon, korek api gas, obat nyamuk bakar, pembasmi nyamuk cair, pembasmi nyamuk spray, pembersih lantai
- Sabun cuci → sabun cuci piring, sabun *creamdetergent*
- Barang kecantikan → bedak, deodorant, body lotion, lipstik, minyak rambut, minyak parfum, pelembap muka, pembersih dan penyegar
- Perawatan kulit, kuku, muka, rambut → tarif *creambath*, potong rambut pria, potong rambut wanita, potong rambut anak
- Biaya kesehatan → biaya dokter umum
- SPP → SD
- Transportasi → angkutan dalam kota

- Alas kaki → sandal kulit pria
- Meubelair → meja kursi tamu
- Peralatan rumah tangga → lemari es
- Perlengkapan perabot rumah tangga → sprengi
- Alat dapur/makan → kompor

Tahap kedua yaitu menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$\text{Paritas Daya Beli}_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

p_{ij} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

Tahap ketiga yaitu menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

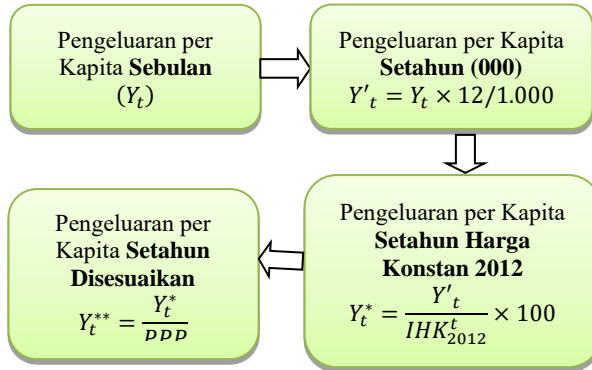
$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan:

Y_t^{**} : rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Ilustrasi penghitungan pengeluaran per kapita:



Rumus Indeks Pendapatan yaitu:

$$I_{pendapatan} = \frac{\ln(pendapatan) - \ln(pendapatan_{min})}{\ln(pendapatan_{maks}) - \ln(pendapatan_{min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran, yaitu:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

2.7 Konsep dan Definisi Disparitas Pembangunan Manusia dan Reduksi Shortfall

Gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan

pembangunan yang dilakukan di suatu daerah secara umum dapat dilihat dari angka IPM yang dicapai oleh daerah tersebut. Perkembangan angka IPM dari tahun ke tahun memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia yang dilaksanakan oleh pemerintah. Namun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi (ranking), namun dapat juga dilihat berdasarkan nilai reduksi *shortfall*.

Reduksi *shortfall* ditujukan untuk melihat kemajuan atau kemunduran dari pencapaian sasaran pembangunan manusia di suatu daerah selama kurun waktu tertentu. Melalui reduksi *shortfall* ini dapat dilihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah. Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai maksimumnya (100), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka capaian IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah.

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan reduksi shortfall per tahun (annual reduction in shortfall). Ukuran ini secara sederhana menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian yang masih harus ditempuh untuk mencapai titik ideal

(IPM=100). Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM ($=r$; dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;141) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$r = \left[\frac{IPM_{t+n} - IPM_t}{IPM_{ideal} - IPM_t} \right]^{1/n}$$

dimana:

IPM_t : IPM pada tahun t

IPM_{t+n} : IPM pada tahun $t + n$

IPM_{ideal} : 100

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1 Kondisi Geografi dan Iklim

Kabupaten Jayawijaya terletak pada posisi 3,45'- 4,2' lintang selatan, serta 138,3'-139,4' bujur timur yang merupakan lembah di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 1.550 sampai dengan 1.653 mdpl dan luas wilayah sebesar 13.925,31 km².

Pada tahun 2010, Kabupaten Jayawijaya hanya mempunyai 11 distrik, yaitu Wamena, Asolokobal, Walelagama, Hubikosi, Pelebaga, Asologaima, Musatfak, Kurulu, Bolakme, Wollo dan Yalengga. Namun pada tahun 2011, 11 wilayah tersebut mekar menjadi 40 distrik dengan 328 wilayah kampung. Kabupaten yang beribukota di Wamena mempunyai batas-batas wilayah:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kab. Mamberamo Tengah, Yalimo dan Tolikara
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Nduga dan Yahukimo
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kab. Nduga dan Lanny Jaya
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kab. Yahukimo dan Yalimo

Iklim

Berdasarkan hasil pencacatan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wamena, dilaporkan bahwa suhu udara di tahun 2020 bervariasi antara 12°C sampai dengan 30°C dengan rata-rata tiap bulan mencapai 19°C. Pada tahun 2020, suhu terendah ada pada bulan Agustus dengan rata-rata suhu udara 19.1°C. Dalam setahun rata-rata kelembapan udara berkisar Antara 60% sampai 84% dengan curah hujan Antara 55.7 – 282.5 dan dalam sebulan terdapat kurang lebih 17 – 28 hari hujan. Musim kemarau dan musim penghujan sulit dibedakan. Berdasarkan data BMKG, bulan Maret adalah bulan dengan curah hujan terbesar, sedangkan curah hujan terendah ditemukan pada bulan Mei.

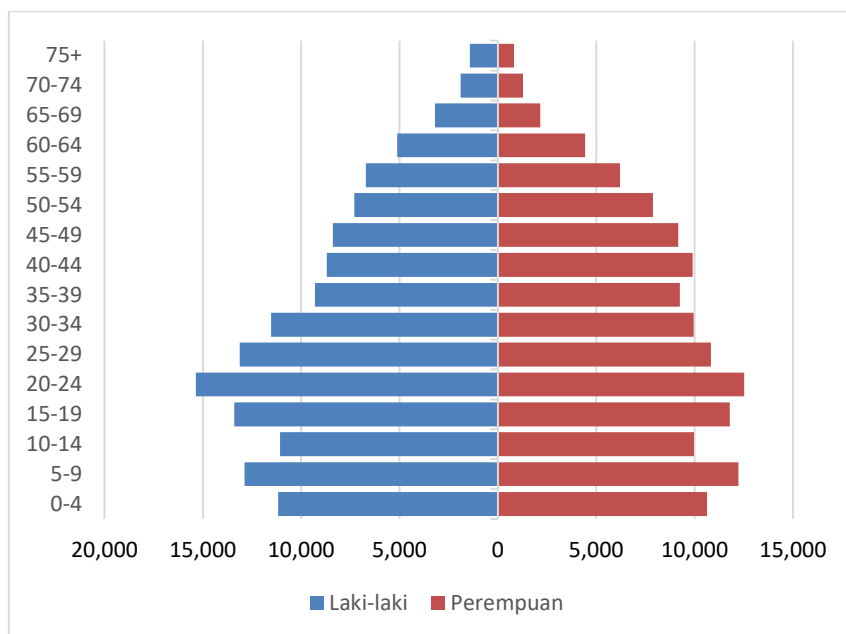
3.2 Kependudukan

Penduduk dalam suatu daerah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam pembangunan, di samping juga sebagai konsumen dalam menikmati hasil pembangunan. Peranan penduduk dalam pembangunan akan berhasil apabila memiliki kemampuan dalam menjawab semua tantangan dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang semakin bertambah banyak dan memiliki kualitas yang baik adalah aset

yang sangat bermanfaat dalam mendorong laju perekonomian

Jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya hasil Sensus Penduduk pada tahun 2020 adalah 269.553 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 140.584 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 128.969 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,022 persen dari tahun 2019. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin pada tahun 2020 adalah 109,006 yang artinya bahwa penduduk laki-laki lebih banyak 9 hingga 10 persen dibandingkan penduduk perempuan. Upaya pengendalian jumlah penduduk hendaknya terus diupayakan dalam rangka menciptakan tatanan keluarga kecil yang sehat dan berkualitas. Berikut disajikan komposisi penduduk Kabupaten Jayawijaya tahun 2020 menurut kelompok umur dan jenis kelamin melalui grafik piramida penduduk:

Grafik 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Sensus Penduduk 2020

Dari grafik diatas, dapat diketahui komposisi penduduk Kabupaten Jayawijaya tahun 2020. Penduduk Kabupaten Jayawijaya dapat dikatakan berstruktur umur muda. Hal ini dapat dilihat dari persentase penduduk usia anak-anak (0 – 14 tahun) sebesar 25,21 persen, jumlah penduduk yang berusia produktif (15 – 64 tahun) berjumlah 70,80 persen, dan jumlah penduduk lansia (≥ 65 tahun) tergolong kecil yaitu 3,99 persen. Hal ini merupakan bonus demografi bagi Kabupaten Jayawijaya apabila

bisa memanfaatkan struktur penduduk ini dengan kebijakan yang baik dan tepat guna. Komposisi penduduk berstruktur umur muda ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga muda yang terampil, mandiri, dan cekatan untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

Struktur umur penduduk juga digunakan untuk melihat Angka Beban Tanggungan (ABT). Pada tahun 2020 ABT di Kabupaten Jayawijaya sebesar 29,20 persen. Angka ini dapat menyimpulkan bahwa terdapat 29 sampai dengan 30 orang usia tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif di Kabupaten Jayawijaya. ABT tersebut akan memacu penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya, yang pada gilirannya akan menjadi modal yang cukup baik mendorong proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya.

Gambaran Umum Wilayah

“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”

BAB IV

ANALISIS

BAB IV

ANALISIS

4.1. Perkembangan IPM Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2015 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-

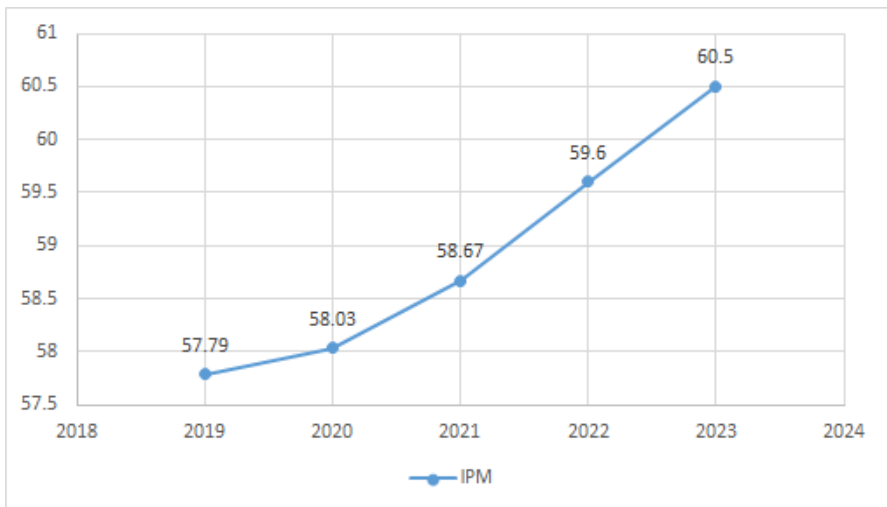
rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia Kabupaten Jayawijaya terus mengalami kemajuan selama periode 2019 hingga 2023.

IPM Kabupaten Jayawijaya meningkat dari 57,79 pada tahun 2019 menjadi 60,50 pada tahun 2023. Pada periode 2022-2023, IPM Kabupaten Jayawijaya meningkat sebesar 0,90 poin. Peningkatan pada periode tersebut sedikit lebih kecil apabila dibandingkan dengan periode 2021-2022, yang naik sebesar 0,93. Selama periode 2019 hingga 2023 IPM Kabupaten Jayawijaya menunjukkan peningkatan ke arah yang lebih baik dengan kenaikan sebesar 2,71. Hingga kini, pembangunan manusia Kabupaten

Jayawijaya masih berstatus “sedang” dan masih sama sejak tahun 2019.

Gambar 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023



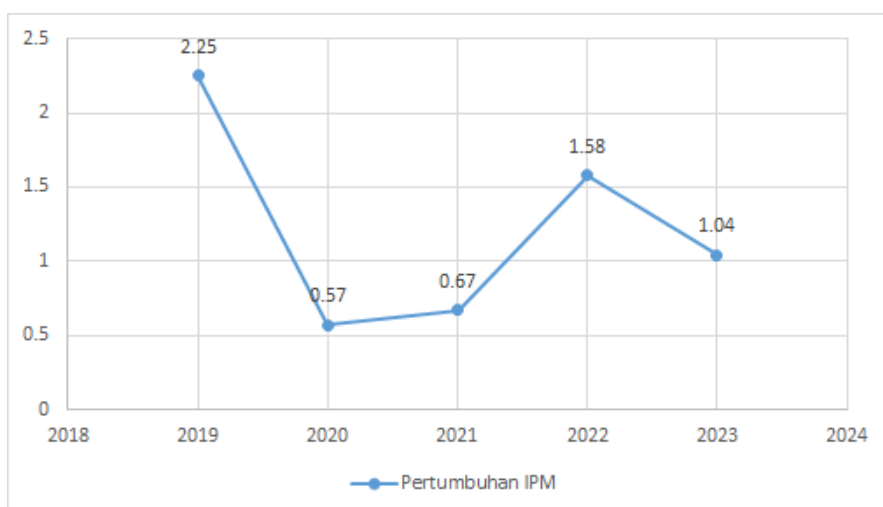
Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

Pertumbuhan IPM

Pertumbuhan IPM digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara pencapaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Nilai pertumbuhan IPM yang positif berarti IPM mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya dan semakin tinggi nilai pertumbuhan, maka semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Gambar 4.2 Perkembangan Pertumbuhan IPM Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), persentase perkembangan nilai IPM di Kabupaten Jayawijaya memiliki peningkatan yang fluktuatif, kadang naik dan kadang juga turun. Perkembangan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu hanya sebesar 0,57 persen kemudian perkembangan yang tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya

memiliki perkembangan yang fluktuatif dan diharapkan dapat terus meningkat di tahun-tahun berikutnya.

4.2. Pencapaian Pembangunan Kapabilitas Dasar Manusia

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, indeks masing-masing komponen IPM juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jayawijaya Menurut Komponen, 2019-2023

Komponen IPM (1)	Tahun				
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)
Angka Harapan Hidup saat Lahir (Tahun)	59,39	59,64	59,90	60,26	60,50
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,93	12,27	12,53	12,83	12,84
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	5,30	5,51	5,60	5,74	5,98
Pengeluaran per Kapita (Juta)	7,84	7,44	7,54	7,76	8,159
IPM	57,79	58,03	58,67	59,60	60,50
Pertumbuhan IPM (%)	2,25	0,57	0,64	1,58	1,04

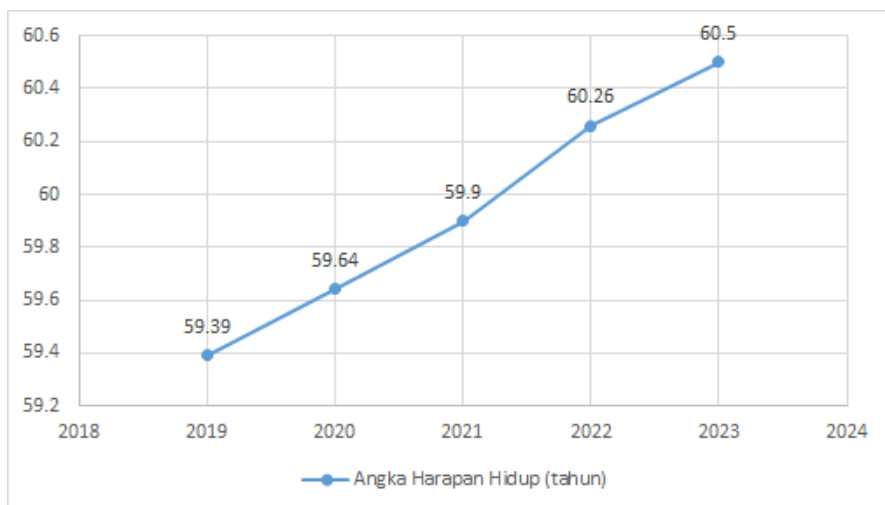
Sumber: BPS Kab.Jayawijaya

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap angka komponen penyusun IPM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan berkelanjutan baik dari segi kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Tetapi angka yang dicapai masih belum optimal sehingga dianggap perlu bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang akan menaikkan nilai komponen penyusun IPM secara signifikan.

4.2.1 Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir merepresentasikan derajat kesehatan penduduk secara umum. Semakin tinggi AHH mengindikasikan bahwa semakin tinggi pula kualitas fisik/kesehatan penduduk suatu daerah. Selama periode 2019 hingga 2023, Kabupaten Jayawijaya telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir sebesar 1 tahun. Jika pada tahun 2019, seorang bayi yang lahir mempunyai peluang untuk hidup hingga usia 59,39 tahun, nilainya terus meningkat menjadi 60,50 tahun pada tahun 2023 yang artinya bahwa secara rata-rata penduduk Jayawijaya dapat hidup hingga usia 60 hingga 61 tahun. Dengan nilai tersebut, dengan standar harapan hidup maksimal 85 tahun maka AHH Jayawijaya termasuk ke dalam kategori sedang.

Gambar 4.3 Angka Harapan Hidup (AHH) Saat Lahir di Kabupaten Jayawijaya (tahun), 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

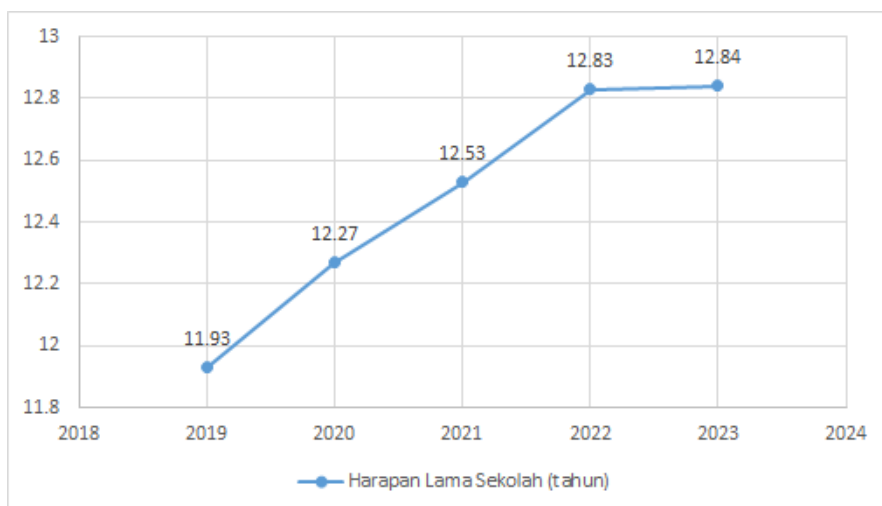
4.2.2 Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2019 hingga 2023, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya telah meningkat sebesar 0,93 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,68 tahun.

Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pada tahun 2023, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya

telah mencapai 12,84 tahun dan meningkat 0,01 poin jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak usia 7 tahun di Kabupaten Jayawijaya memiliki peluang untuk mengenyam bangku pendidikan mereka hingga lulus bangku sekolah menengah atas bahkan sampai bangku kuliah.

Gambar 4.4 Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023



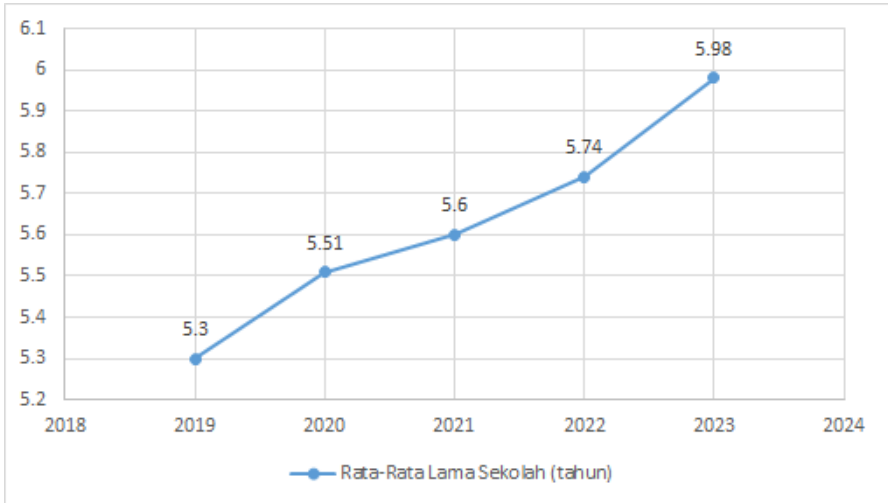
Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

Selain indikator Harapan Lama Sekolah, terdapat juga indikator Rata-rata Lama Sekolah. Meskipun nilainya selalu meningkat setiap tahunnya, peningkatan RLS di Kabupaten Jayawijaya masih terbilang sangat kecil. Akan tetapi

pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Kabupaten Jayawijaya yang lebih baik, dimana hingga tahun 2023 rata-rata lama sekolah yang sudah ditempuh penduduk usia 25 tahun ke atas adalah 5,98 tahun. Yang artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Jayawijaya usia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas 5 SD. Merujuk hal di atas boleh dibilang bahwa umumnya pendidikan dasar 6 tahun di Jayawijaya belum terlaksana. Oleh karena itu, sudah selayaknya pembangunan di bidang pendidikan menjadi prioritas utama.

Karena pendidikan pada dasarnya merupakan modal bagi penduduk dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia. Jika kondisinya saja sudah jauh dari yang diharapkan, tentunya akan berdampak pada pembangunan yang lain.

Gambar 4.5 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023

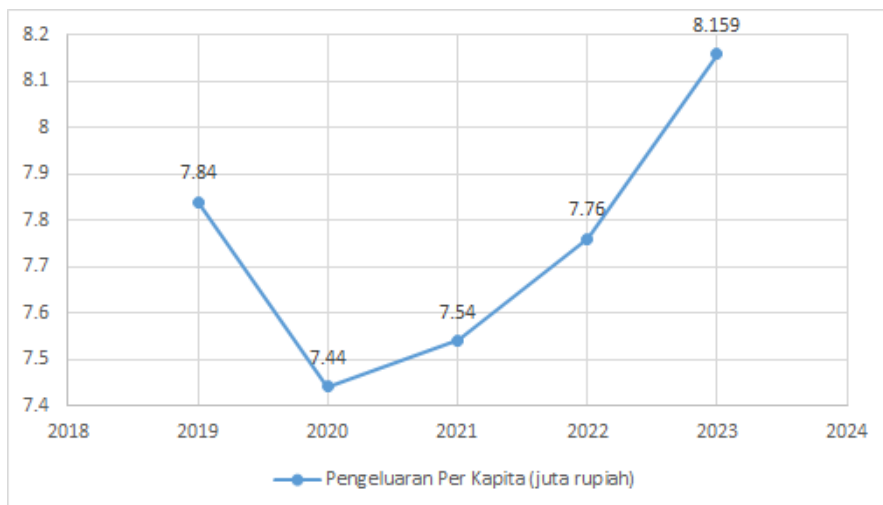


Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

4.2.3 Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita masyarakat di Kabupaten Jayawijaya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat di Jayawijaya mencapai Rp8,159 juta per tahun. Selama lima tahun terakhir pengeluaran per kapita per tahun masyarakat telah meningkat sebesar Rp 339 ribu.

Gambar 4.6 Perkembangan Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023



Sumber: BPS Kab Jayawijaya

4.3. Indikator Kesehatan, Pendidikan dan Perekonomian Kabupaten Jayawijaya

4.3.1. Indikator Kesehatan

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Masyarakat yang sehat tentunya didukung oleh sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Juga tentunya dipengaruhi oleh perilaku kebiasaan masyarakat itu sendiri. Program pembangunan kesehatan oleh pemerintah diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki derajat kualitas hidup yang tinggi,

serta memiliki kesadaran akan pentingnya hidup sehat. Oleh sebab itu indikator kesehatan menjadi sangat penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin baik tingkat kesehatan penduduk maka semakin baik modal pembangunannya.

Secara umum sistem kesehatan nasional telah mengalami peningkatan, termasuk di Kabupaten Jayawijaya. Peningkatan di bidang kesehatan secara kuantitas dari segi tenaga Kesehatan meningkat dibanding tahun 2020, namun jumlah fasilitas kesehatan tidak mengalami peningkatan. Jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk, dimana jumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 mencapai 278.180 jiwa (hasil proyeksi penduduk).

Tabel 4.2 Fasilitas dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten Jayawijaya, 2022 dan 2023

Fasilitas/Tenaga Kesehatan	2022		2023	
	Jumlah	Rasio terhadap penduduk	Jumlah	Rasio terhadap penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Rumah Sakit	1	277.923	1	278.180
2. Puskesmas	26	10.689	30	9.273
3. Pustu	37	7.511	37	7.518
4. Dokter	63	4.411	77	3.613
5. Perawat	333	834	424	656

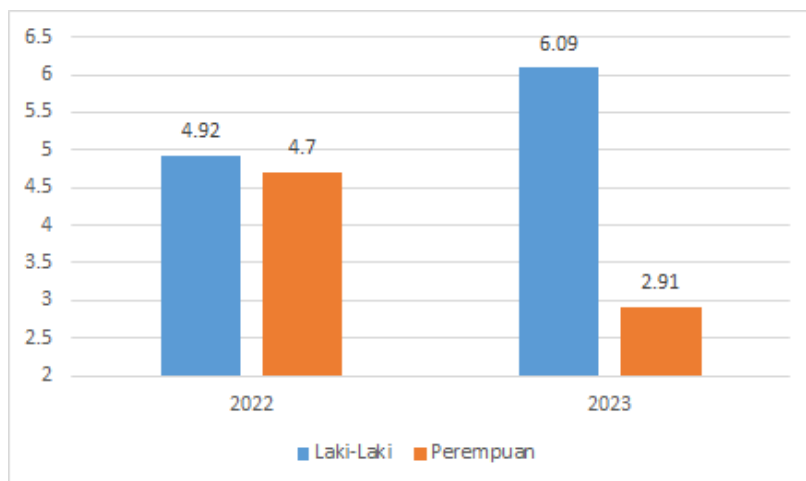
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Jayawijaya & BPS Kabupaten Jayawijaya

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduknya. Secara garis besar, tingkat morbiditas mencerminkan angka kesakitan yang dialami oleh penduduk. Morbiditas menunjukkan adanya gangguan atau keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang biasa dialami penduduk antara lain: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi dan campak. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan

kesehatan, semakin tinggi nilai morbiditas dan berarti semakin rendah derajat kesehatan di wilayah tersebut.

Angka morbiditas penduduk diperoleh dari Susenas pada rincian pertanyaan mengenai keluhan kesehatan yang dialami selama satu bulan sebelum pencacahan. Meskipun pada saat pencacahan, petugas susenas tidak dibarengi dengan petugas kesehatan, namun dari pengakuan responden mengenai keluhan kesehatan sudah dianggap representatif untuk menggambarkan keluhan dari suatu indikasi penyakit yang sudah sangat umum.

Gambar 4.7 Angka Kesakitan Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2023



Sumber: BPS, Susenas 2023

Selama satu tahun terakhir terjadi penurunan angka kesakitan di Kabupaten Jayawijaya untuk penduduk perempuan

Pada penduduk laki-laki terjadi kenaikan angka kesakitan sebesar 1,17 poin, sedangkan pada penduduk Perempuan menurun sebesar 1,79 poin.

Hal yang juga menentukan derajat kesehatan penduduk adalah tingkat kesehatan balita diantaranya terkait pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan imunisasi. ASI dipercaya sebagai nutrisi terbaik untuk bayi, terutama bayi yang baru lahir dan dianjurkan untuk terus diberikan hingga usia dua tahun. Hal ini karena kandungan nutrisi dalam ASI yang unik, spesifik dan kompleks dengan komponen imunologis dan komponen pemacu pertumbuhan. Bayi yang diberikan ASI (setidaknya selama enam bulan) memiliki penurunan resiko terhadap berbagai penyakit dan kematian bayi.

Tabel 4.3 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah diberi ASI dan Lamanya Pemberian ASI di Kabupaten Jayawijaya, 2022-2023

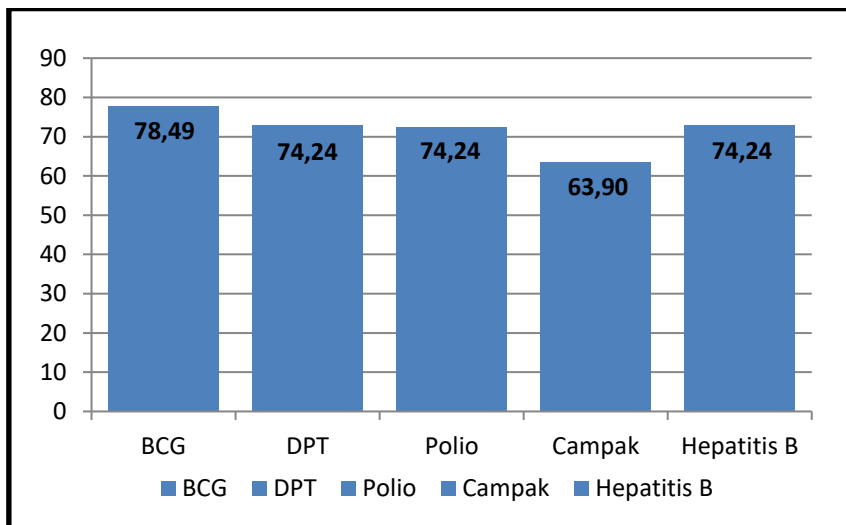
Indikator	2022	2023
(1)	(2)	(3)
Pernah diberi ASI (persen)	100,0	80,79
Rata-rata pemberian ASI (bulan)	11.60	16,85

Sumber: BPS Kabupaten Jayawijaya, Susenas

Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa persentase anak usia kurang dari dua tahun yang pernah diberi ASI mencapai 80,79 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan hingga 80,79 persen baduta usia 0-23 bulan menerima asupan susu ibu secara eksklusif. Pada rata-rata lamanya pemberian ASI, terjadi kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 yaitu dari 11,60 bulan menjadi 16,85 bulan. Meskipun mengalami kenaikan, angka tersebut masih terbilang rendah karena pemberian asi pada baduta seharusnya dilakukan selama 24 bulan.

Sementara itu jika dilihat dari aspek pemberian imunisasi, secara umum lebih dari setengah balita di Jayawijaya telah mendapat imunisasi. Imunisasi sangat penting diberikan kepada balita sebagai langkah pencegahan penyakit. Oleh karena itu, memperluas jangkauan imunisasi kepada seluruh balita menjadi pekerjaan rumah yang harus disegerakan pencapaiannya. Capaian imunisasi Jayawijaya pada tahun 2023 berdasarkan jenis imunisasi BCG, Polio, DPT, Hepatitis B, dan Campak/MMR masing-masing sebanyak 78,49 persen; 74,24 persen; 74,24 persen; 63,90 persen; dan 74,24 persen.

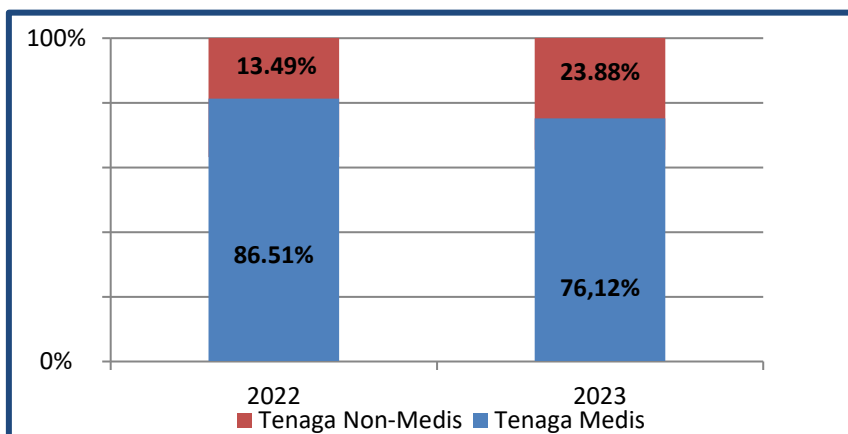
Gambar 4.8 Persentase Balita yang Mendapat Imunisasi di Kabupaten Jayawijaya, 2023



Sumber: BPS, Susenas 2023

Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir rendah, juga berkaitan erat dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman dan perawatan bayi pada saat dilahirkan. Berikut persentase perempuan 25-49 tahun yang pernah kawin dan penolong proses kelahiran terakhir di kabupaten Jayawijaya:

Gambar 4.9 Persentase Perempuan 15-49 Tahun yang Pernah Kawin dan Penolong Proses Kelahiran Terakhir Kabupaten Jayawijaya, 2022 dan 2023



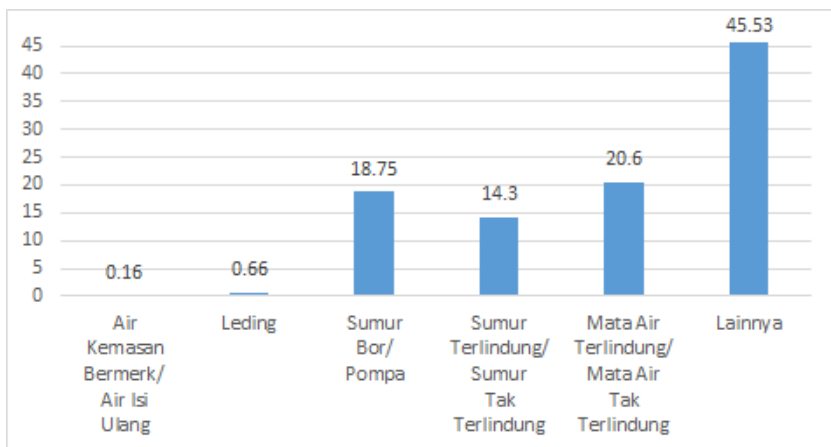
Sumber: BPS, Susenas

Penolong kelahiran oleh tenaga medis di Kabupaten Jayawijaya tergolong cukup baik. Data Susenas 2022 mencatat bahwa banyaknya kelahiran yang ditolong tenaga medis berada pada angka 86,51 persen pada penolong kelahiran terakhir dan sisanya dibantu oleh tenaga non-medis seperti dukun beranak dan famili/keluarga. Sebagian wilayah geografis Jayawijaya berupa pegunungan dengan jarak rumah menuju layanan kesehatan seperti puskesmas relatif sangat jauh, yang tidak memungkinkan seorang ibu yang akan melahirkan untuk menjangkaunya, menyebabkan sebagian besar persalinan dibantu oleh sanak keluarga. Kondisi ini jika dibiarkan akan mendorong meningkatnya kasus t

kematian ibu dan bayi, karena pada saat persalinan tidak tertangani dengan baik. Angka persalinan yang dibantu oleh tenaga medis pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi sebesar 76,12 persen.

Faktor lain yang juga mempengaruhi derajat kesehatan penduduk yaitu kondisi kesehatan lingkungan seperti akses rumah tangga terhadap air bersih dan sanitasi layak. Akses penduduk terhadap ketersediaan air bersih, baik itu untuk minum maupun aktivitas lain seperti mandi, mencuci, dan lain-lain tidak kalah penting sebagai penentu tingkat kesehatan penduduk.

Gambar 4.10 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang Digunakan Untuk Mandi/Cuci/dll di Kabupaten Jayawijaya, 2023



Sumber: BPS, Susenas 2023

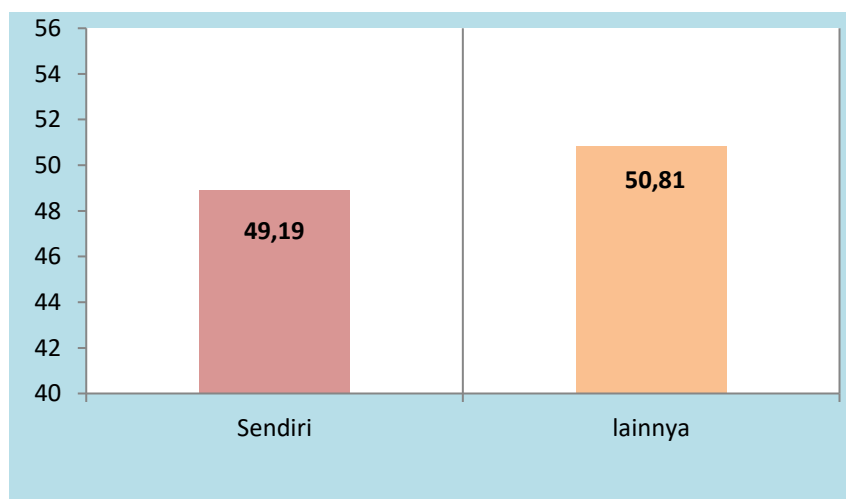
Sesuai konsep yang digunakan dalam Susenas, sumber air dikatakan bersih jika air bersumber dari air kemasan, air ledeng, air bor/pompa, air sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jaraknya lebih dari 10 m dari pembuangan limbah terdekat. Air bersih menurut konsep di sini adalah yang digunakan untuk minum. Dalam satu hari seseorang membutuhkan air minum rata-rata 1,5 liter (sekitar 8 gelas). Artinya jika satu rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota (ayah, ibu, dan 2 orang anak) maka dalam satu hari rumah tangga tersebut membutuhkan sedikitnya 6 liter air untuk keperluan minum. Jika kondisi air yang diminum tersebut tidak mempunyai syarat cukup “air bersih”, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan bagi peminumnya.

Selain akses terhadap air bersih, salah satu kebutuhan penting dalam tempat tinggal adalah tersedianya fasilitas sanitasi seperti fasilitas buang air besar (jamban). Rumah tangga cenderung akan memilih tempat tinggal yang memiliki jamban sendiri karena lebih terjaga kebersihannya.

Memiliki fasilitas jamban sendiri dalam rumah tempat tinggal merefleksikan perspektif kesejahteraan maupun kelestarian lingkungan yang lebih baik, sedangkan jamban umum (di sungai/kali atau di tempat-tempat umum lainnya) dan tidak menggunakan jamban (seperti BAB di kebun/ladang/hutan dan sejenisnya) berimplikasi pada kelestarian lingkungan. Semakin

banyak masyarakat membuang air besar di sungai atau kebun akan semakin besar efeknya terhadap sanitasi lingkungan.

Gambar 4.11 Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Tempat BAB di Kabupaten Jayawijaya, 2023

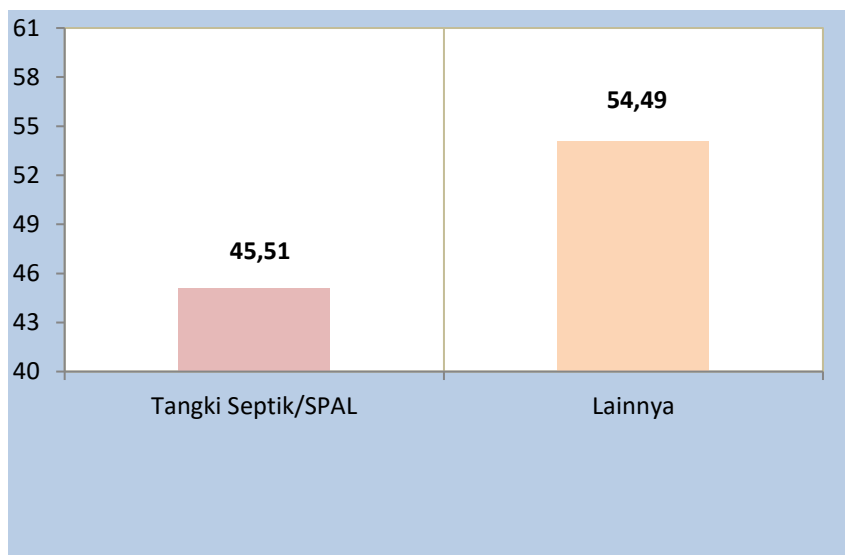


Sumber: BPS, Susenas 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 sebesar 49,19 persen rumah tangga di Jayawijaya memiliki fasilitas jamban sendiri; sebesar 50,81 persen termasuk menggunakan fasilitas jamban umum/komunal dan tidak memiliki fasilitas jamban. Untuk wilayah perdesaan lebih dari setengah rumah tangganya membuang air besar di kebun/ladang/hutan dan sejenisnya.

Penggunaan jamban sendiri atau bersama dengan tangki septik merupakan indikator fasilitas rumah tinggal yang cukup penting dalam mendukung tersedianya sanitasi layak. Akses ke fasilitas sanitasi yang memadai merupakan dasar mengurangi resiko penyakit yang ditimbulkan oleh tinja seperti diare pada anak-anak.

Gambar 4.12 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Jayawijaya, 2023



Sumber: BPS, Susenas 2023

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa, sebagian besar rumah tangga sudah menggunakan tangki septik/IPAL/SPAL meskipun jamban yang digunakan bukan milik sendiri. Persentase

rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak, yakni rumah tangga yang menggunakan jamban baik sendiri maupun bersama dengan pembuangan akhir berupa tangki septik/SPAL, yaitu sebesar 45,51 persen; sedangkan 54,49 persen rumah tangga lainnya menggunakan tempat pembuangan akhir tinja lainnya seperti lubang tanah, sungai, dll.

Minimnya fasilitas air bersih dan sanitasi layak di Jayawijaya perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, karena kejadian diare khususnya pada balita dan penyakit mematikan lainnya sangat erat kaitannya dengan tersedianya sanitasi yang layak dan kebersihan.

4.3.2. Indikator Pendidikan

Peningkatan kualitas penduduk diperlukan supaya penduduk tidak menjadi beban bagi pembangunan, tetapi justru dapat menjadi aset pembangunan. Pendidikan sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, yang juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sebagai salah satu hak asasi manusia, pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan bagi setiap penduduk Indonesia dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat 1. Yang berbunyi bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

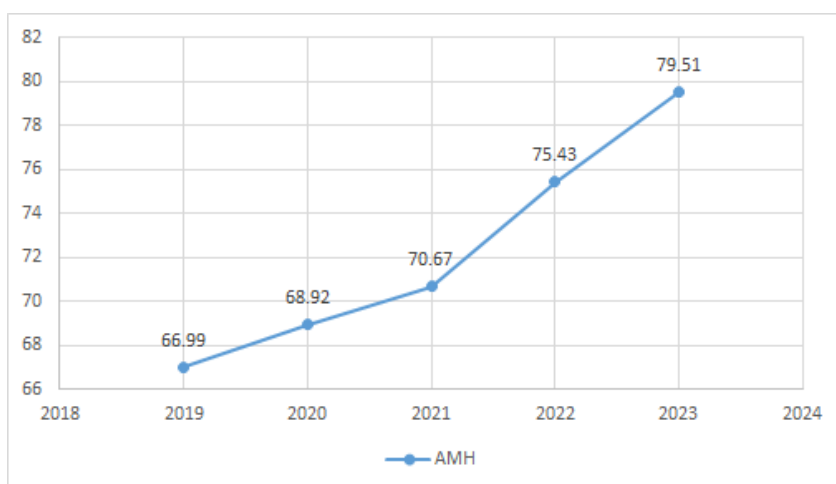
Informasi maupun gambaran mengenai situasi dan kondisi pendidikan di Kabupaten Jayawijya diperlukan sebagai bahan evaluasi pembangunan manusia. Informasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung sistem pendidikan nasional serta strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional yang paling efektif dan efisien untuk diterapkan di Kabupaten Jayawijaya. Hasil pembangunan pendidikan dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, serta kualitas pelayanan pendidikan.

A. Angka Melek Huruf

Melek huruf merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berakitan dengan berbagai situasi (UNESCO). Angka Melek Huruf (AMH) adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah.

Hasil Susenas 2023 menunjukkan bahwa persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang melek huruf di Kabupaten Jayawijya sebesar 79.51 persen. Gambaran perkembangan tingkat melek huruf di Kabupaten Jayawijya dari tahun 2019-2023 disajikan pada gambar 4.14 berikut

Gambar 4.13 Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

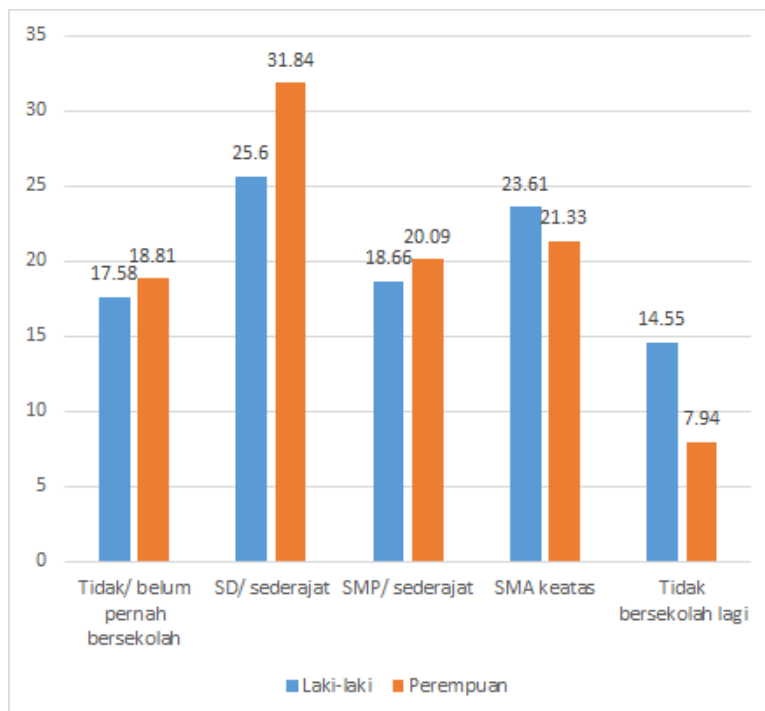
B. Tingkat Pendidikan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia dapat dievaluasi melalui pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan

dapat diidentifikasi melalui ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi kesejahteraannya. Kualitas sumber daya manusia merupakan modal dasar dalam menghadapi persaingan global.

Hasil Susenas 2023 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat Jayawijaya masih rendah. Sebanyak 17.58 persen laki-laki dan 18.81 persen perempuan umur 7-24 tahun belum pernah bersekolah. Sebanyak 25.6 persen laki-laki dan 31.84 perempuan masih bersekolah SD/ sederajat; 18.66 persen laki-laki dan 20.09 perempuan masih bersekolah SMP/ sederajat; 23.61 persen laki-laki dan 21.33 persen perempuan masih bersekolah SMA atau pendidikan yang lebih tinggi; dan 14.55 persen laki-laki dan 7.94 persen perempuan yang sudah tidak bersekolah lagi.

Gambar 4.14 Persentase Penduduk Berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, 2023



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Susenas 2023

C. Tingkat Partisipasi Sekolah (APS dan APM)

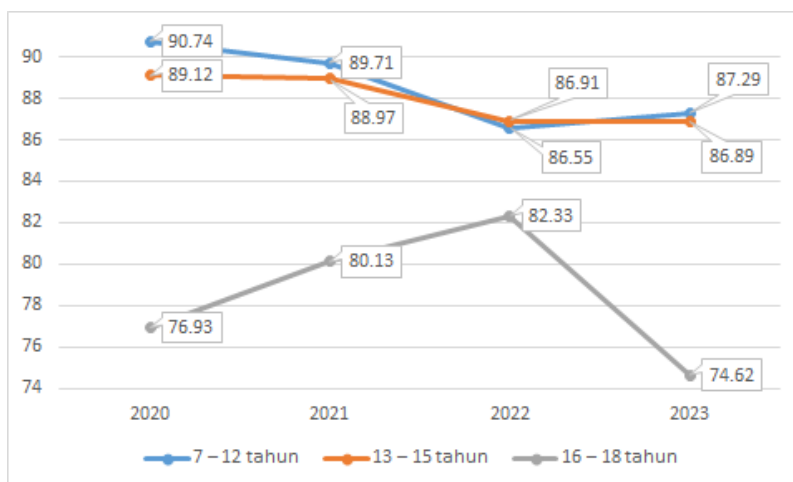
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Oleh karena

itu, ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah tercermin dalam APS. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah oleh penduduk usia tertentu. APS juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk yang berkaitan dengan sekolah.

Faktor demografis yang mempengaruhi akses penduduk terhadap pendidikan adalah umur. Semakin tinggi kelompok umur sekolah, semakin rendah tingkat partisipasinya sekolahnya. Hal tersebut juga tercermin dalam APS di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023, APS penduduk umur 7-12 tahun mencapai 87,29 persen yang artinya, bahwa masih terdapat 12,71 persen penduduk umur 7-12 tahun yang tidak bersekolah. Angkanya sedikit meningkat menjadi 86,89 persen untuk kelompok umur 13-15 tahun dan hanya 76,42 persen pada kelompok umur 16-18 tahun. Ini berarti meskipun lebih dari 80 persen penduduk kelompok umur 7-12 tahun sudah bersekolah, namun tidak semuanya melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang masih sedikit dan kondisi geografi yang sulit kerap kali menjadi hambatan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, faktor ekonomi

juga mendorong penduduk usia sekolah untuk berhenti sekolah dan lebih memilih bekerja.

Gambar 4.15 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2023

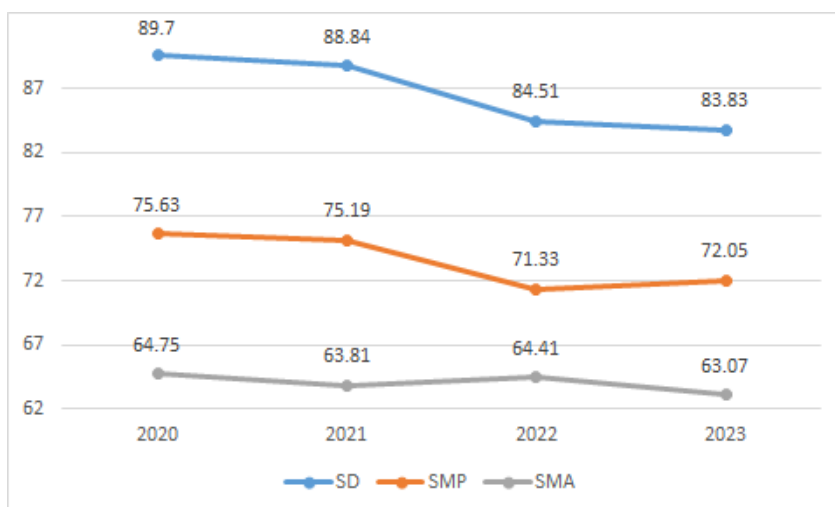


Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Susenas 2020-2023

Indikator lain untuk melihat partisipasi penduduk dalam mengakses pendidikan adalah Angka Partisipasi Murni (APM). APM diartikan sebagai proporsi penduduk kelompok umur sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur sekolah tersebut. APM menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat tertentu yang sesuai

dengan umurnya. Dengan demikian, APM mencerminkan penduduk umur sekolah yang bersekolah tepat waktu.

Gambar 4.16 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Jayawijaya, 2020-2023



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

APM untuk tingkat pendidikan SD di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 mencapai persen yang artinya, bahwa terdapat 83,83 persen penduduk umur 7-12 yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Sebesar 72,05 persen penduduk umur 13-15 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SMP dan sebesar 63,07 persen penduduk umur 16-18 tahun yang bersekolah tepat waktu pada jenjang SMA.

APM pada setiap jenjang pendidikan masih belum mencapai angka 100 persen. Hal ini mencerminkan bahwa penduduk dengan umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya.

D. Kualitas Pelayanan Pendidikan

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, penyelenggara pendidikan berkewajiban untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, antara lain sekolah, ruang kelas dan tenaga pengajar. Jumlah sekolah ini tentu akan meperbesar kesempatan bagi anak-anak Jayawijaya untuk dapat mengenyam pendidikan. Jumlah fasilitas pendidikan yang ada jika dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah masih terlalu sedikit. Dengan kurangnya fasilitas pendidikan sementara jumlah penduduk usia sekolah selalu meningkat tentu membuat kesempatan mendapatkan pendidikan semakin kecil.

Selain jumlah sekolah, mutu pendidikan juga dapat dilihat melalui beban guru karena guru merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses pendidikan. Salah satu indikator untuk menilai beban guru

adalah melalui rasio murid-guru. Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah guru yang tersedia pada jenjang pendidikan tersebut. Dengan kata lain, rasio murid-guru menggambarkan rata-rata jumlah murid yang harus dihadapi oleh seorang guru. Standar ideal rasio murid-guru adalah 1:40 (40 siswa untuk setiap guru) untuk SD; 1:21 untuk SMP; dan 1:21 untuk SMA.

Tabel 4.4 Jumlah Sekolah, Murid, Guru dan Rasio Murid-Guru Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya, 2022/2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah			Rasio Murid-Guru
		Sekolah	Murid	Guru	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	SD/ MI	125	24584	1040	24
2	SMP/ MTS	37	8274	487	17
3	SMA/ MA/ SMK	21	4293	280	15

Sumber: Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya

Dari Tabel 4.4 diketahui bahwa di Tahun Ajaran 2022/2023, rasio murid guru SD sebesar 1:24; jenjang SMP sebesar 1:17; dan pada jenjang SMA

sebesar 1:15. Dengan demikian rasio murid-guru pada tingkat SD, SMP dan SMA telah memenuhi standar yang berlaku.

Hal ini membuktikan bahwa pendidikan di Kabupaten Jayawijaya sudah layak karena telah memenuhi standar yang berlaku, bahkan melebihi standar.

4.3.3. Indikator Perekonomian

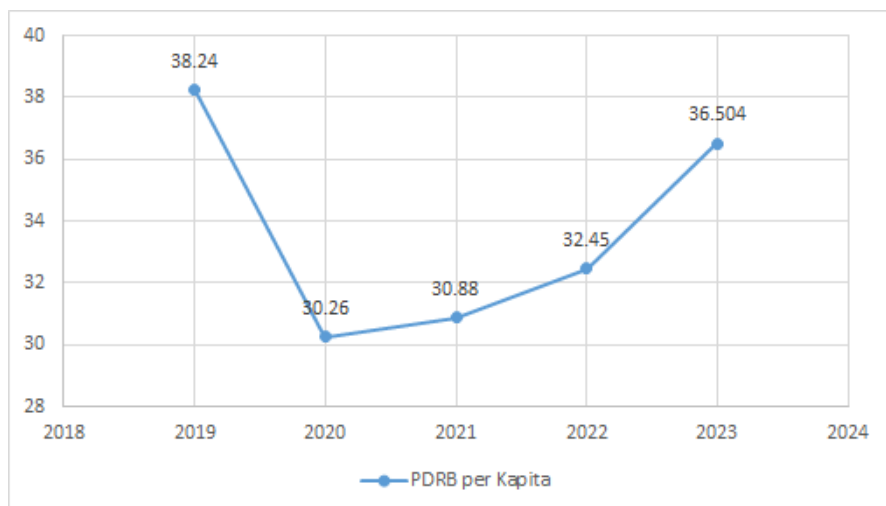
Paradigma konvensional dari suatu pembangunan adalah memfokuskan pembangunan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Seiring dengan perkembangannya, paradigma ini mulai mengalami perluasan konsep, di mana sebelumnya manusia berperan sebagai alat dari suatu pembangunan, berubah menjadi manusia sebagai tujuan akhir dari suatu pembangunan. Paradigma ini dikenal dengan istilah pembangunan manusia. Menurut UNDP (1990) pembangunan manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Diantara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Konsep ini membawa penduduk sebagai pusat dari pembangunan, dan bukan meletakkannya di sekeliling pembangunan. Meskipun demikian, akselerasi pembangunan manusia yang tinggi tidak akan tercapai tanpa didukung dengan pembangunan ekonomi yang mumpuni. Indikator makro ekonomi yang dapat mengukur pembangunan ekonomi suatu daerah, diantaranya adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, penyerapan tenaga kerja, dan distribusi pendapatan.

A. PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang diterima oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas ekonomi/produksi. Angka PDRB per kapita dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesejahteraan rakyat, walaupun tidak dapat secara langsung menggambarkan tingkat kesejahteraan/kemakmuran suatu kelompok masyarakat atau penduduk.

Gambar 4.17 Perkembangan PDRB per Kapita di Kabupaten Jayawijaya, 2019-2023



Sumber: BPS Kab. Jayawijaya

Seiring dengan aktivitas ekonomi yang kian tumbuh, PDRB per kapita Jayawijaya juga menunjukkan tren peningkatan. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Jika pada tahun 2020 PDRB per kapita penduduk Jayawijaya adalah 30,26 juta rupiah, pada tahun 2023 meningkat menjadi 36,504 juta rupiah. Kenaikan ini secara tidak

langsung mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat di Jayawijaya.

B. Ketenagakerjaan (TPAK dan TPT)

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan melihat keberhasilan pembangunan suatu daerah dilihat dari aspek ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Beberapa indikator tersebut merupakan data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2018.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. TPAK diperoleh dari perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Penduduk dikatakan telah memasuki usia kerja jika berusia 15 tahun ke atas. Selanjutnya tidak semua penduduk usia kerja tergolong sebagai angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif dalam pasar kerja, baik mereka yang sedang bekerja, mencari pekerjaan, maupun sementara tidak bekerja. Dengan kata lain TPAK mengukur partisipasi aktif penduduk dalam perekonomian.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Pengangguran terbuka (*open unemployment*) didefinisikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja dan sementara tidak bekerja, terdiri dari :

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Pengertian pengangguran tidak dapat disamakan dengan pencari kerja, karena sering kali terjadi di antara pencari kerja terdapat mereka yang tergolong bekerja namun karena berbagai alasan masih mencari pekerjaan lain, untuk kasus tersebut dia akan tergolong sebagai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diperoleh dari hasil bagi antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 4.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Jayawijaya, 2023

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(1)	(2)	(3)
Laki-laki+Perempuan	85,93	0,51

Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Sakernas 2023

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2023, TPAK Jayawijaya adalah sebesar 85,93 persen. Artinya, sebanyak 85,93 persen penduduk Jayawijaya yang berusia 15 tahun ke atas berpartisipasi secara aktif dalam perekonomian. Sedangkan sisanya 14,07 persen adalah mereka yang termasuk ke dalam kelompok bukan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya).

TPT Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 adalah sebesar 0,51 persen. Artinya bahwa hampir seluruh angkatan kerja memiliki status bekerja atau dengan kata lain hampir tidak ada penduduk yang menganggur. Begitu pula yang terjadi pada kabupaten - kabupaten pemekarannya. Ketiadaan penganggur disebabkan karena biasanya dalam satu rumah tangga, pekerjaan

bertani/berkebun dilakukan secara bersama-sama antara anggota rumah tangga yang satu dengan yang lain, sehingga meskipun status seseorang hanya sekedar “membantu”, tetap diklasifikasikan sebagai bekerja. Hal ini menegaskan bahwa *zero unemployment* (TPT = 0,00) bukanlah jaminan kesejahteraan bagi penduduknya.

C. Distribusi Pendapatan

Beberapa aspek yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi.

Adanya peningkatan pendapatan biasanya akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan (*Engel's Law*). Hal tersebut terkait dengan tingkat kepuasan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan akan makanan merupakan syarat minimum untuk setiap individu bertahan hidup namun pemenuhan kebutuhan makanan akan mencapai kepuasan maksimum pada tingkat tertentu atau adanya titik kejenuhan sehingga pengeluaran makanan juga akan terbatas sampai titik jenuh tersebut. Berbeda dengan kebutuhan akan non makanan yang tak terbatas atau tidak ada titik jenuhnya,

sehingga setelah kebutuhan akan makanan terpenuhi tentunya kenaikan pendapatan akan lebih cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan non makanan.

Di negara-negara yang lebih maju, persentase konsumsi makanan biasanya di bawah 50 persen. Disamping itu, di negara-negara berkembang dari segi pemerataan pendapatan masih sulit diwujudkan. Dalam usaha pemerataan pendapatan ini pemerintah berusaha memberantas kemiskinan dengan jalan pemerataan pembangunan, pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan pemerataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa yang akan datang.

Gini Ratio, Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana tingkat ketimpangan pendapatan penduduk antara lain rasio gini dan kriteria Bank Dunia.

Rasio gini merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai nol sampai dengan satu. Apabila nilai rasio gini mendekati 0, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila rasio gini mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi makin tinggi. Rasio gini dibagi dalam tiga kategori:

- a. $GR > 0,5$ keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan tinggi
- b. $GR 0,4 - 0,5$ keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan sedang
- c. $GR < 0,4$ keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketimpangan rendah

Distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Jayawijaya pada tahun 2023 juga termasuk ke dalam kategori ketimpangan rendah, di mana pada tahun 2023, Gini Ratio Kabupaten Jayawijaya adalah 0,319. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Jayawijaya hampir merata.

Pola Pengeluaran Rumah Tangga, Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih relatif besar (mendekati 50 persen) dari total pengeluaran per kapita. Sebaliknya pada negara maju pengeluaran per kapita yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran per kapita.

Tabel 4.6 Rata-rata Pengeluaran dan Konsumsi per Kapita per Bulan di Kabupaten Jayawijaya, 2023

Kelompok Pengeluaran & Konsumsi	Rata-rata
(1)	(2)
Konsumsi Kalori Perkapita (Kcal)	1793,30
Konsumsi Protein Perkapita (gram)	41,63
Pengeluaran Makanan Perkapita (Rupiah)	1.017.647
Pengeluaran Non Makanan Perkapita (Rupiah)	741.272
Pengeluaran Perkapita (Rupiah)	1,758,919

Sumber: BPS Kab. Jayawijaya, Susenas 2023

Tabel di atas menunjukkan persentase pengeluaran per kapita penduduk jayawijaya per bulan menurut jenis pengeluaran. Berdasarkan hasil Susenas, pada tahun 2023 sebesar 1.017.647 rupiah atau lebih dari setengah total pengeluaran penduduk Jayawijaya dialokasikan untuk konsumsi makanan, sisanya sebesar 741.272 rupiah dialokasikan untuk konsumsi bukan makanan.

“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap indikator-indikator tunggal kesejahteraan rakyat maupun indikator agregat IPM, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Ada tiga komponen penting (dimensi) dalam penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM); yaitu lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan/tingkat pendidikan (*knowledge*), dan standar hidup (*decentliving*).
2. Metode Penghitungan IPM sekarang sudah menggunakan metode yang baru dimana perbedaannya adalah sebagai berikut:
 - a. Penghitungan IPM menggunakan tidak lagi menggunakan Rumus Aritmetik namun menggunakan Rumus Geometrik.
 - b. Angka Melek Huruf digantikan dengan Harapan Lama Sekolah.
 - c. Rata-rata lama sekolah tidak lagi dihitung untuk kelompok umur 15 tahun ke atas namun untuk 25 tahun ke atas.

- d. Penghitungan Paritas Data Beli (PPP) menggunakan 96 komoditi terpilih dimana pada metode lama hanya menggunakan 27 komoditi terpilih.
 - e. Pembagian kategori level IPM menjadi lebih tinggi dibanding kategori metode yang lama.
3. Penggunaan Metode baru ini memberikan dampak antara lain:
- a. Secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama.
 - b. Terjadi perubahan peringkat IPM.
 - c. Peringkat tidak bisa diperbandingkan akibat adanya perbedaan indikator dan metodologi.
4. Capaian IPM Kabupaten Jayawijaya meningkat dari 59,60 pada tahun 2022 menjadi 60,50 pada tahun 2023. Secara absolut, IPM Kabupaten Jayawijaya meningkat 0,90 poin. Kenaikan IPM disebabkan terutama oleh naiknya pertumbuhan pada komponen pendidikan dan kesehatan.

5.2 Saran

Pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah memulai pembangunan dengan mengutamakan pembangunan kualitas

Penutup

kesehatan, pendidikan dan perekonomian menuju Jayawijaya Baru. Dukungan semua pihak akan mengantarkan Kabupaten Jayawijaya sejajar dengan kabupaten/kota lain yang lebih dahulu maju. Dengan mengacu pada capaian IPM tahun 2023, tantangan pembangunan manusia semakin jelas. Pembangunan Infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi harus terus dilakukan dan menjadi prioritas utama. Pembangunan Sekolah, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Pustu yang baru harus selalu dilakukan tiap tahun untuk mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, jumlah dan kualitas tenaga pengajar dan tenaga medis juga perlu untuk selalu ditingkatkan. Pembinaan masyarakat dengan memanfaatkan keunggulan dan produksi lokal dan memberikan jalan untuk memasarkan produksi tersebut akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya. 2024. *Jayawijaya Dalam Angka 2023*. Wamena: BPS Kabupaten Jayawijaya

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. 2024. *Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2023*. Jayapura: BPS Provinsi Papua

BPS, UNDP, dan Bappenas. 2001. *Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. 2024. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua 2023*. Jayapura: BPS Provinsi Papua

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua. 2024. *Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2023*. Jayapura: BPS Provinsi Papua

Daftar Pustaka

“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”

LAMPIRAN

Kode	Kabupaten/Kota	UHH (SP2010)				Harapan Lama Sekolah (HLS)				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
9402	Jayawijaya	59.64	59.90	60.26	60.50	12.27	12.53	12.83	12.84	5.51	5.60	5.74	5.98
9416	Yahukimo	65.93	66.05	66.31	66.42	7.61	7.62	7.80	8.04	4.26	4.27	4.28	4.34
9417	Pegunungan Bintang	64.44	64.54	64.79	64.99	6.25	6.47	6.59	6.78	2.81	3.04	3.23	3.37
9418	Tolikara	65.71	65.83	66.08	66.33	8.60	8.61	8.83	9.02	3.64	3.65	3.67	3.68
9429	Nduga	55.27	55.43	55.70	55.72	3.61	3.87	4.07	4.33	1.13	1.42	1.58	1.71
9430	Lanny Jaya	66.06	66.11	66.31	66.51	8.62	8.89	9.07	9.27	3.20	3.43	3.59	3.71
9431	Mamberamo Tengah	63.59	63.75	64.05	64.14	8.93	9.22	9.44	9.62	3.15	3.33	3.48	3.63
9432	Yalimo	65.42	65.49	65.72	65.95	9.11	9.32	9.50	9.66	2.79	3.01	3.19	3.34
Kode	Kabupaten/Kota	Pengeluaran Riil per Kapita				IPM (UHH SP2010)							
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023				
9402	Jayawijaya	7,441	7,545	7,765	8,159	58.03	58.67	59.60	60.50				
9416	Yahukimo	4,875	4,895	5,101	5,351	49.37	49.48	50.25	51.19				
9417	Pegunungan Bintang	5,409	5,429	5,618	5,849	45.44	46.28	47.21	48.18				
9418	Tolikara	4,826	4,841	5,079	5,397	49.50	49.60	50.51	51.48				
9429	Nduga	3,975	3,976	4,190	4,352	31.55	32.84	34.10	35.19				
9430	Lanny Jaya	4,350	4,393	4,559	4,751	47.86	48.68	49.62	50.56				
9431	Mamberamo Tengah	4,462	4,487	4,630	4,855	47.57	48.32	49.25	50.22				
9432	Yalimo	4,647	4,664	4,802	5,015	48.34	49.01	49.90	50.87				

“Halaman Ini Sengaja Dikosongkan”

DATA
MENCERDASKAN
BANGSA



**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jayawijaya**

Jl. Yos Sudarso, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua
Pegunungan